

Kalapas Karanganyar tandatangani Pakta Integritas Zona Integritas WBK/WBBM

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.UPDATES.CO.ID

Jan 21, 2023 - 13:16





Kalapas Karanganyar tandatangani Pakta Integritas Zona Integritas WBK/WBBM

NUSAKAMBANGAN- Kalapas Karanganyar ikuti penandatanganan Zona Integritas WBK/WBBM dengan Kanwil Kemenkumham Jateng . Rabu (18/01)

Sebagai langkah kongkret di awal tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Jateng kembali menggelar kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, bertempat Wisma Sari Nusakambangan.

Komitmen tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin bersama Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan.

Pada momen itu juga, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis termasuk Ka UPT Lapas Karanganyar yang berkomitmen dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah

Kakanwil Kemenkumham Jateng mengungkapkan, kegiatan ini sebenarnya memungkinkan untuk dilaksanakan secara internal di masing-masing UPT.

Namun, Yuspahruddin menilai, sebuah komitmen idealnya disaksikan oleh banyak pihak, sehingga menjadi sakral dan lebih mengikat.

"Kegiatan seperti ini memang seharusnya disaksikan banyak pihak. Harus disiarkan, harus disebarluaskan. Agar kita semua benar-benar berkomitmen melaksanakan janji yang telah kita tandatangani bersama," ujar Yuspahruddin dalam sambutannya.

"Apa yang kita lakukan sekarang dilihat oleh banyak orang. Ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab untuk ditunaikan".

"Jangan sampai kegiatan yang selalu kita lakukan setiap tahun ini, hanya sebatas seremonial saja. Hanya sekedar formalitas. Kita harus benar-benar mewujudkan Pembangunan Zona Integritas," imbuhnya.

Kakanwil juga mengajak jajarannya untuk berkinerja tinggi untuk merealisasikan Resolusi Kemenkumham 2023 yakni Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai yang ditargetkan Pemerintah.